

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penggelapan pajak oleh badan usaha di KPP Pratama Kuala Tungkal berjalan sistematis mulai dari pengawasan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan dan koordinasi dengan aparat lain. Proses ini memenuhi unsur teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, meski efektivitasnya dipengaruhi faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Data periode 2022-2024 menunjukkan semua kasus teridentifikasi ditindaklanjuti, tapi memerlukan perbaikan untuk optimalisasi.
2. Fiskus di KPP Pratama Kuala Tungkal menghadapi hambatan kompleks seperti keterbatasan SDM dan kapasitas teknis, kesulitan pelacakan aset, koordinasi antar lembaga yang lambat, serta keterbatasan data intelijen. Faktor ini memperpanjang proses pengungkapan dan melemahkan pemulihan kerugian negara. Hambatan ini saling terkait dan menuntut upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana.
3. Fiskus melakukan upaya preventif seperti sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan usaha, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta represif melalui pemeriksaan dan penyidikan. Pendekatan ini seimbang antara persuasif dan penindakan, sesuai teori kepatuhan. Upaya terintegrasi ini

membangun kepatuhan formal-material dan efektivitas penegakan hukum pidana secara berkelanjutan.

B. Saran

1. KPP Pratama Kuala Tungkal perlu tingkatkan pelatihan SDM khusus audit forensik dan teknologi data *analytics* untuk percepat identifikasi bukti permulaan penggelapan pajak. Bangun sistem *monitoring real-time* berbasis AI guna deteksi anomali SPT badan usaha secara otomatis. Perkuat koordinasi lintas lembaga melalui MoU dengan Polri dan Kejaksaan untuk percepat transfer berkas perkara.
2. Fiskus wajib rekrut tenaga ahli IT pajak dan tingkatkan anggaran alat pelacak aset digital untuk atasi keterbatasan SDM teknis. Bentuk satuan tugas lintas instansi dengan KPI jelas guna percepat koordinasi dan berbagi data intelijen. Lakukan audit berkala terhadap sistem internal KPP untuk tutup celah kebocoran informasi.
3. Luncurkan program sosialisasi digital intensif via webinar dan aplikasi *mobile* untuk edukasi kepatuhan sukarela badan usaha kecil-menengah. Integrasikan sistem e-audit nasional dengan fitur *whistleblower* anonim berhadiah untuk dorong pengungkapan sukarela. Evaluasi triwulanan efektivitas upaya preventif dengan metrik peningkatan rasio kepatuhan 20% per tahun.